





Palagan Ukraina

HARIAN PAGI

Tribun Jogja

SPIRIT DIY-JATENG

• ECERAN Rp2.000 • LANGGANAN Rp55.000 • INFO IKL •
 NAN: 0851 0 000 0274

JUMAT LEGI
 20 JANUARI 2023
 27 JUMADIL AKHIR 1444
 NO 4218/TAHUN 12
 TERBIT 12 HALAMAN

Pedagang Kecil Terancam Tekor



Eceran Gas Melon Tembus Rp25 Ribu

YOGYA, TRIBUN - Harga LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai merangkak naik. Diding, seorang pedagang pisang goreng keju di kawasan kuliner Kasihan, Bantul, merasakan kenaikan harga LPG subsidi itu. "Mulai naik ini, sebelumnya 18 ribu kadang 20 ribu. Sekarang ini udah 25 ribu (per tabung)," ucapnya, Kamis (19/1).

Pria 57 tahun ini pun harus lebih efisien lagi agar penghasilannya tidak tekor. Salah

• ke halaman 11



Ya, penginnya (harga LPG) enggak usah naiklah. Baru juga pulih setelah Covid-19, masak kayak gini, susah lagi.

Diding
Pedagang

LPG SUBSIDI SULIT TERBELI

Harga jual eceran gas melon di DIY kini tembus Rp25 abutabung. Kondisi ini menyulitkan sejumlah pedagang kecil yang mengandalkan gas melon sebagai bahan bakar. Sebelumnya, harga gas melon di tingkat eceran rata-rata di angka Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per tabung.

Padahal, stok gas melon di DIY hingga kini cukup aman, mencapai 467 metrik ton/hari atau sekitar 155.667 tabung/hari.

Kondisi sulit ini akan semakin dirasakan ketika pemerintah sudah menggrapkan penjualan gas melon hanya untuk yang berhak.

Nantinya, hanya warga yang masuk terdaftar DTKS dan P3KE yang bisa membeli gas melon dengan menggunakan KTP.

Bagi masyarakat yang belum masuk data, maka akan dilakukan pembaruan data. Baru kemudian dapat membeli seperti biasa dengan KTP.

TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

DAGANG - Seorang pedagang pisang goreng di Yogya sedang melayani pelanggan, Kamis (19/1). Mereka merasakan kesulitan dengan naiknya harga gas melon.

Pedagang Kecil Terancam

● Sambungan Hal 1

satu caranya dengan mengurangi bahan baku untuk penjualan demi memperkecil biaya operasional. "Ya, pengennya (harga LPG) enggak usah naiklah. Baru juga pulih setelah pandemi (Covid-19), masak kayak gini, susah lagi, yang di atas (pemerintah) gimana ini," keluhnya.

Diding merupakan mantan karyawan di sebuah pabrik perkakas rumah tangga. Ia baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pabriknya kerja dulu. Hingga akhirnya dia berjualan pisang goreng untuk menyambung hidup.

Dia pun berharap harga kebutuhan pokok, termasuk gas melon kembali stabil lagi. Sebab, dia tak bisa membeli gas melon di pangkalan, jadi harus menebus dengan harga eceran yang tentu saja lebih tinggi.

Kondisi yang sama juga dialami Muslimin, seorang pedagang keripik singkong. Dia terpaksa mengurangi bahan baku singkong agar biaya operasional tak membengkak. Jika biasanya menghabiskan 12 kg singkong dalam sehari, kini dia hanya memproduksi keripik dengan bahan baku 8 kg singkong saja. Dia pun berharap pemerintah lebih bijaksana dalam mencari solusi atas ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.

Penyesuaian harga

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY meminta Pemda DIY segera menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) gas melon di awal tahun ini. Usulan itu muncul lantaran kondisi di lapangan, terutama di toko

kelontong, tak sedikit yang menjual LPG subsidi itu melebihi ketentuan.

Sebagaimana diberitakan, wilayah Jawa Barat dan Bali sudah lebih dulu menaikkan harga gas melon. Hiswana Migas DIY khawatir stok LPG 3 kg di DIY akan dialihkan ke wilayah yang saat ini sudah melakukan penyesuaian harga.

"Tentunya gini, dengan adanya kenaikan itu tentunya wilayah-wilayah di sekitar dari Jabar dan Bali, dalam hal ini Jawa Tengah dan Jawa Timur (termasuk DIY), ya, mau enggak mau harus ikut menyesuaikan dengan daerah yang sudah menaikkan itu," jelas Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY, Siswanto. "Daripada nanti barang-barangnya lari ke daerah-daerah yang harganya sudah naik. Karena hukum dagangnya kan gitu," sambungnya.

Di Bali LPG 3 kg mengalami penyesuaian harga menjadi Rp18.000 sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan pergub setempat. Sebelumnya, HET LPG 3 kg di Pulau Dewata hanya Rp14.500 pada 2014.

"Oleh sebab itu dimungkinkan dengan sudah adanya kenaikan segala macam, Jawa Tengah tentunya juga pasti akan menaikkan juga. Kenaikan itu sebetulnya melegalkan harga yang ada di pasaran sekarang ini. Kan harganya sekitar 18 sampai 19 ribu, ya, tentunya HET sekitar itu. Cuma, permasalahannya kalau misal nanti harga itu segitu, memang dimungkinkan nanti di tingkat masyarakat naik," terang dia.

Tetapi menurut Siswanto, diperlukan peran pemerintah daerah untuk meminimalisasikan terjadinya ketimpangan harga LPG 3 kg setelah HET terbaru ditentukan. Pemerintah daerah diminta

melakukan pengawasan di lapangan apabila usulan penyesuaian HET LPG 3 kg itu dapat diakomodasi. "Pemda itu berperan dalam hal pengawasan agar peraturan pemda, baik bupati atau gubernur ditaati. Itu tentunya juga harus ada pengawasan terhadap adanya perubahan harga itu," tegasnya.

Siswanto menuturkan, harga LPG 3 kg di DIY mau tidak mau harus menyesuaikan daerah-daerah lainnya. Selain itu, Hiswana Migas DIY juga menyayangkan adanya toko yang menjual LPG subsidi dengan harga Rp25 ribu per tabung. Kondisi itu mereka jumpai saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul.

"Kenapa itu kok tinggi (harganya), ya, karena dia ngambilnya agak jauh dan dia ngambilnya juga kemungkinan tidak dari pangkalan, kemungkinan dari warung jadi sudah dieret itu. Makanya, pemerintah sekarang ini minta supaya pendistribusian LPG 3 kg itu benar-benar sampai kepada masyarakat," terang dia. Oleh sebab itu Hiswana Migas mendukung penuh kebijakan pemerintah mewajibkan pembeli LPG subsidi harus menunjukan KTP.

Tak tergesa

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti menanggapi, pemerintah DIY tak ingin tergesa-gesa melakukan penyesuaian harga gas melon. Salah satu alasannya, karena kondisi ekonomi saat ini masih belum stabil, sebab daya beli masyarakat di DIY masih rendah.

"Kami masih akan lebih mendalami kembali dengan penyesuaian harga ini. Jangan sampai nanti kami keluarkan ini, malah harga di lapangan naik lagi. Ini yang

kami khawatirkan seperti itu," jelas Syam.

Meski begitum, pihaknya sudah membahas rencana penyesuaian HET gas melon subsidi bersama Hiswana Migas DIY. "Ini kan tindak lanjut usulan dari Hiswana itu, karena di lapangan kenyataan harga gas 3 kilo itu rata-rata sudah di atas yang ditentukan dari Pemda DIY," jelasnya.

Pertimbangan lain belum disetujulkannya usulan penyesuaian harga LPG 3 kg lantaran Pemda DIY masih memantau angka inflasi daerah. "Ini yang juga menjadi salah satu faktor, yang akan kami lihat kembali kedalamannya, nanti perkembangannya seperti apa, sambil kami melakukan koordinasi, kajian terkait hal itu. Kemudian daya beli masyarakat, kemudian margin yang wajar itu seperti apa," papar Syam.

Pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk membuat regulasi yang mengatur harga eceran tertinggi gas melon. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan harga yang signifikan, hingga berujung pada bertambahnya beban masyarakat. Termasuk pula supaya pedagang eceran gas melon tidak mengambil margin terlalu besar dari HET yang sudah diatur.

Syam menambahkan, aturan penetapan HET hanya berlaku sampai ke agen gas saja. Untuk pengaturan dan pengawasan HET di tingkat toko kelontong/pengecer belum ada. "Nanti ke depan, harapan kami bupati dan wali kota itu akan menetapkan harga yang sampai ke tingkat pengecer itu, harga tertingginya berapa," jelasnya. Dengan demikian, konsumen diharapkan mendapatkan harga LPG 3 kg yang wajar atau tidak ditentukan secara asal-asalan. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005